



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APKB)
KOTA BATAM TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Batam sebagai bukti akuntabilitas vertikal. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, dan kami sangat menghargai segala kritik dan saran yang konstruktif demi untuk perbaikan LKjIP ini. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Batam, 05 Februari 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Batam
Kepala,



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Data Umum Organisasi	3
	D. Sistematika Penyajian	10
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
	A. Rencana Strategis	11
	B. Tujuan dan Sasaran	12
	C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	14
	D. Rencana Kinerja	15
BAB III	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19
	A. Capaian Kinerja	19
	B. Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV	PENUTUP	43
LAMPIRAN		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performance result*) selama tahun anggaran 2023.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2023 ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar **Rp 29.470.474.206,-** dengan dana yang terserap sebesar **Rp 26.332.319.155,-** sampai dengan bulan Desember dengan persentase serapan anggaran sebesar **89.35 %**.

Pelaksanaan program sepanjang tahun 2023 secara umum terlaksana dengan baik yang berkorelasi langsung substansi kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat luas sehingga implikasinya dirasakan pada capaian indikator program kegiatan tahun 2023.

Hasil capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah mencapai beberapa sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023. Untuk target indikator kinerja IPG sebesar 94.46%, IDG sebesar 58.50% dengan capaian IPG 94,75%, dan IDG 58.65 %. Untuk target indikator kinerja Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak sebesar 6 % dengan kondisi saat ini terjadi peningkatan sebesar 23.2% kasus kekerasan dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dan Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangsa) dengan target TFR 2.34 dan i Bangsa 57.26 dengan capaian masing- masing sebesar 2.16 dan 59.76 pada tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Batam, berlangsung dengan mengacu pada perencanaan (jangka menengah) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam dan selanjutnya dijabarkan dalam Renstra setiap unit organisasi. RPJMD dan Renstra unit organisasi memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu menengah (lima tahunan).

Sebagai salah satu bentuk perwujudan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, serta sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

DP3APPKB Kota Batam menyusun LKJIP 2023 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan. Penyusunan didasarkan pada pencapaian sasaran dan kinerja setiap kegiatan yang berlangsung selama Tahun 2023, dan selanjutnya laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan kegiatan tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKJIP ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 jo. Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah

C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan dasar pembentukan SOTK ini adalah;

- PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada BAB V Tentang Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah, dan pada Bagian tiga tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan (pada pasal 22).
- Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Batam No. 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara sinergi berkesinambungan.

Sesuai Peraturan Walikota tersebut kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam No. 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, selain tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemnuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemnuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemnuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Koordinator Perencanaan Program
3. Sub Koordinator Urusan Keuangan

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Sub Koordinator Urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
2. Sub Koordinator Urusan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
3. Sub Koordinator Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Sub Koordinator Urusan Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;
2. Sub Koordinator Urusan Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi; dan
3. Sub Koordinator Urusan Pemenuhan Hak Anak Di bidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawahi :

1. Sub Koordinator Urusan Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Sub Koordinator Urusan Perlindungan Anak; dan
3. Sub Koordinator Urusan Data Informasi Perempuan Dan Anak.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :

1. Sub Koordinator Urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian Penduduk;
2. Sub Koordinator Urusan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
3. Sub Koordinator Urusan Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi.

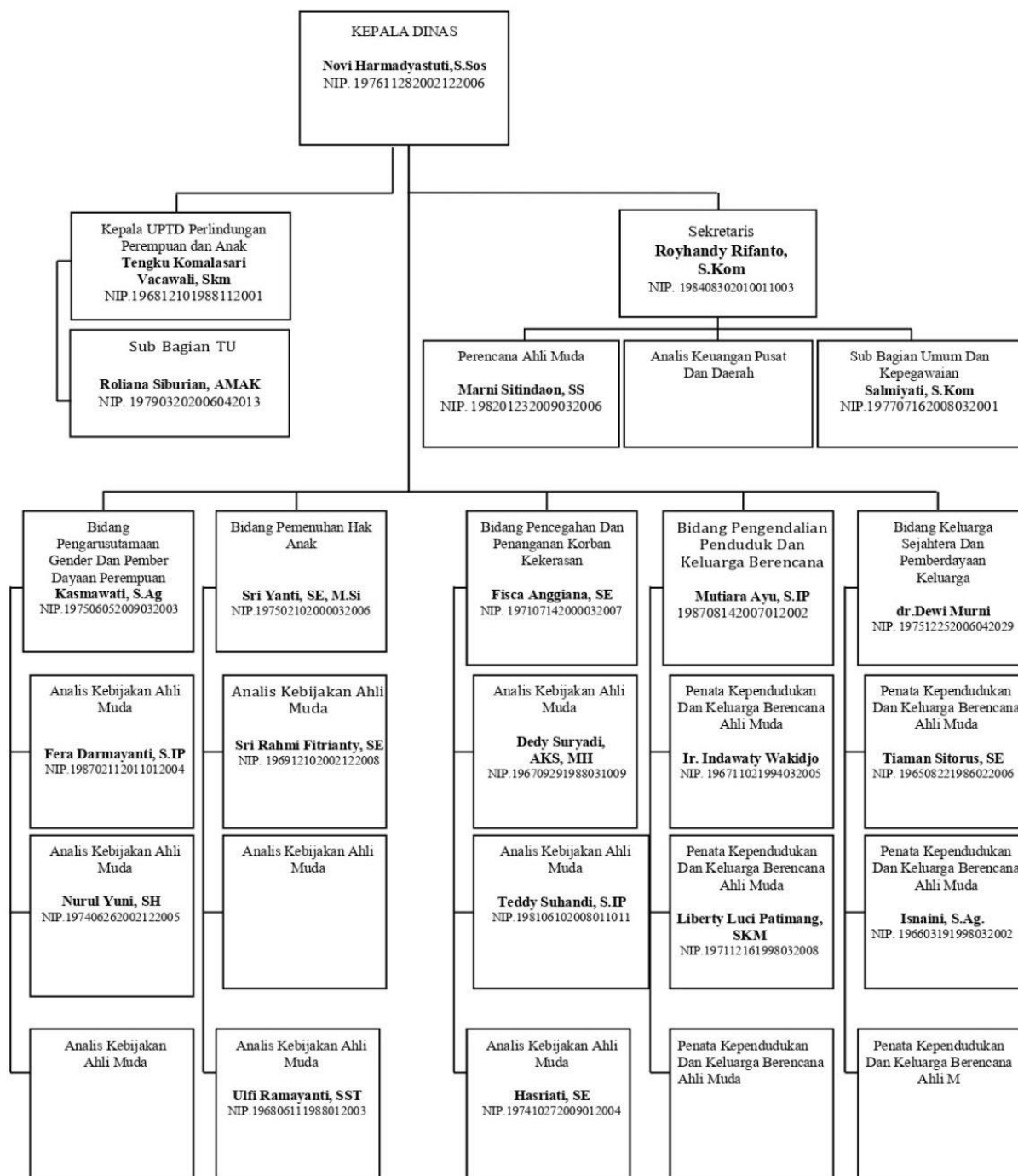
g. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :

1. Sub Koordinator Urusan Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Sub Koordinator Urusan Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
3. Sub Koordinator Urusan Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM



3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus menerus dan berkesinambungan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis didalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kota Batam, yang didalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek strategis organisasi antara lain berkenaan dengan tugas dan fungsi organisasi sehingga dipandang perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan berwawasan nasional secara optimal dan memadai,
- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 3) Pemerataan dan peningkatan Pelayanan dibidang Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi baik berupa pengadaan Alat Kontrasepsi maupun penyediaan petugas layanan.
- 4) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian Keluarga Sejahtera melalui pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, maka kedudukan dan peran perempuan perlu mendapat perhatian khusus serta perlu ditingkatkan secara terus menerus, sehingga kedepan terutama untuk tingkat Kabupaten/Kota perempuan menjadi salah satu unsur terpenting dalam keluarga Yang memegang kunci utama keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kemudian yang berikutnya adalah masih adanya kaum perempuan yang latar belakang pendidikannya belum memadai sehingga sangat diperlukan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyadaran gender dimasyarakat tentunya melalui program yang berorientasi pada peran, aspirasi, keutuhan dan permasalahan perempuan secara komprehensif.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam didukung oleh personel/ SDM sebanyak 58 orang dengan uraian sebagai berikut

:

Tabel 1.1 Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	7	4	11
2.	Fungsional	-	-	10	-	10
3.	Staf	-	3	18	1	22
5.	PPPK	-	-	-	-	4
6.	THL	-	-	-	-	11
Jumlah		-	3	35	5	
Jumlah						58

Tabel 1.2 Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-	-	1	9	1	11
2.	Fungsional	-	-	-	10	-	10
3.	Staf	-	4	7	9	2	22
5.	PPPK	-	4	-	-	-	4
6.	THL	-	4	1	6	-	11
Jumlah		-	12	9	34	3	58

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang: Data Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika Penyajian

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang: Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; serta Akuntabilitas Keuangan.

Bab 4 Penutup menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada DP3APPKB Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama DP3APPKB beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan DP3APPKB Kota Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintahan di Kota Batam.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

4.1. VISI & MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, **Visi Kota Batam** adalah ***”Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”***

Dan **Misi** yang menjadi acuan penetapan tujuan Dinas sesuai RPJMD 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia”***

4.2. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi dan misi walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APKB Kota Batam menetapkan Tujuan :

“Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri”

4.3. SASARAN

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis DP3AP2KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran dirumuskan untuk mewujudkan atau menjelaskan tujuan yang akan di capai.

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

- 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan kota Batam**
- 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak**
- 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk**
- 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga**

Dengan indikator kinerja utama :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Persentase Penurunan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Angka Kelahiran Total (TFR)
4. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Penetapan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan yang akurat efisien dan dapat dicapai.

Adapun sasaran sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan anak di laksanakan melalui Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pengarusutamaan gender; mengoptimalkan peran kelembagaan Pokja PUG dan focal point perangkat daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender; mengoptimalkan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.*

2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui upaya meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan, meningkatnya capaian Kota Layak Anak.
3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dilakukan melalui upaya. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE, optimalisasi peranan kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB, Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga, UPPKS dan PIK-KRR.
4. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga dilakukan melalui upaya melalui aktivitas pelatihan/pembinaan ketahanan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga.

B. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1) Kebijakan

Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan ataupun tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi kebijakan- kebijakan yang ditetapkan Walikota Batam dan berbagai kebijakan internal lainnya yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021-2022. Kebijakan tersebut meliputi :

- Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG; Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang

- Menyelenggarakan Sosialisasi dan Koordinasi penyelenggaraan Anggaran Responsif gender pada perangkat daerah
- Peningkatan penyuluhan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kota layak anak
- Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
- Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2) Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
2. Program Peningkatan Kualitas keluarga
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan

Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

1) Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2022. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

d) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2) Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.46%
		<p>Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera 3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.50%
		Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak melalui :	Persentase penurunan kasus kekerasan	6%

		<p>1. Program Perlindungan Perempuan</p> <p>2. Program Pemenuhan Hak Anak</p> <p>3. Program Perlindungan Khusus Anak</p>	terhadap perempuan dan anak	
		<p>Terkendalinya pertumbuhan Penduduk Melalui :</p> <p>1. Program Pengendalian Penduduk</p> <p>2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p>	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.34 %
		<p>Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui :</p> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p>	Indeks Pembangunan Keluarga	57.26%

BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target yang tertuang dalam indikator kinerja utama Dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban Kinerja Instansi setiap tahunnya. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yaitu:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak
3. Terkendalinya pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam keempat sasaran strategis di atas bertujuan untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang pada tahun 2023 berada pada capaian 94.75. Pelaksanaan program di tahun 2023 secara umum telah terlaksana dengan baik dan tidak mengalami kendala signifikan yang berpengaruh terhadap realisasi dan capaian kinerja. Dari total pagu Anggaran sebesar **Rp 29.470.474.206,-** dengan anggaran yang terserap sebesar **Rp 26.332.319.155,-** dan persentase sebesar **89.35%**.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam diwujudkan melalui pelaksanaan Program :

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
3. Peningkatan Kualitas Keluarga

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Perempuan
2. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Program Pemenuhan Hak Anak

Sasaran Strategis Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk di wujudkan melalui Program :

1. Pembinaan Keluarga Berencana
2. Pengendalian Penduduk

Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga diwujudkan melalui program :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Dan Program Penunjang Urusan Administrasi pemerintah sebagai Program pendukung yang merangkum semua pelaksanaan kinerja dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Sesuai dengan Indikator perjanjian kinerja Tahun 2023 program tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Berikut capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam Tahun 2023:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			KATEGORI
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.50	58.65	100.25%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	6%	Meningkat 23.2 %	Tidak Tercapai	
3	Terkendalnya pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,34	2,16	108.3%	Sangat Tinggi

4	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	57.26	59.76	104.3%	Sangat Tinggi
---	--	-----------------------------	-------	-------	--------	---------------

Tabel 3.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.45	58.38	99.88%	58.50	58.65	100.25 %
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	5.5%	Meningkat 4.41 %	Tidak Tercapai	6%	Meningkat 23.2 %	Tidak Tercapai
3	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,36	2,16	109.25%	2.34	2,16	108.3 %
4	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	57.24	55.99	97.81%	57.26	59.76	104.3%

Pembangunan manusia berbasis gender merupakan program prioritas Dinas pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan sasaran pencapaian Indeks pembangunan Gender yang berkorelasi dengan pencapaian misi ke-2 Walikota Batam dalam upaya Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Dan misi ini dituangkan dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yakni Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) bersinergi erat dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam komponen pengukuran untuk Indeks pembangunan Gender yang berkaitan dengan Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki-laki. Kelima aspek tersebut berkontribusi erat dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sepanjang tahun 2023 pelaksanaan program dalam mendukung tercapainya keempat sasaran diatas telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94.75.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam mendukung terlaksananya pembangunan kota Batam dari berbagai sektor kehidupan yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan pemberdayaan gender kota Batam. Gambaran secara umum saat ini masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

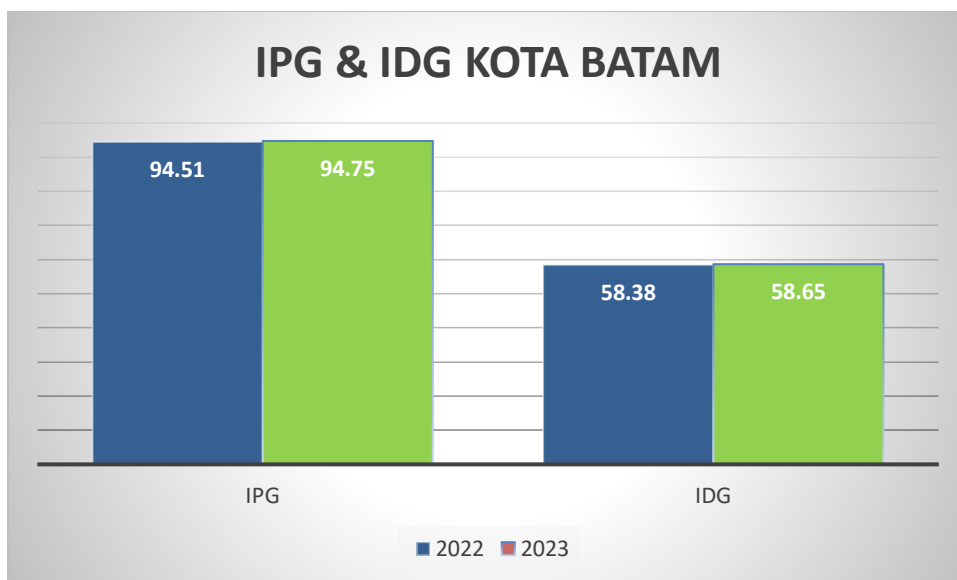
Pada tahun 2023, 21.062 orang perempuan turut aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perempuan yang mencakup pelatihan kuliner/tata Boga, pelatihan Publik Speaking, Pelatihan Tata Rias dan kegiatan pembinaan yang bersinergi dengan PKK Kota Batam. Berbagai kegiatan pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan kota Batam. Pada tahun 2023 diadakan pelatihan tata rias bagi 630 orang ibu rumah tangga, pelatihan tata boga/kuliner bagi 2.077 orang, pelatihan pengembangan SDM perempuan 710 orang, pelatihan lanjutan kuliner dan pengembangan usaha bagi 730 orang, pelatihan pengembangan SDM Perempuan 450 orang

orang dan pelatihan Public Speaking bagi 1065 orang perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan kaum perempuan.

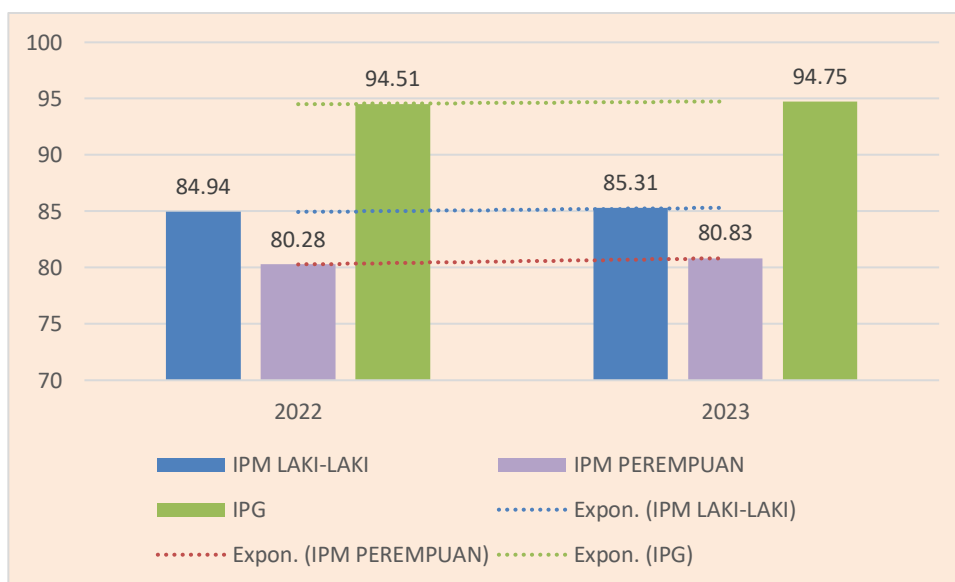
Pada tahun 2023 Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Kelembagaan PUG telah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam tetap melakukan upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender melalui koordinasi melalui pelatihan PPRG bagi 50 orang perencana dan staf OPD se-kota Batam. Representasi program ini dicapai melalui pencapaian anggaran yang berbasis gender yang pada tahun 2023 Anggaran Responsif Gender kota Batam mencapai angka 10.39% dari total belanja langsung APBD sebesar Rp. 3.298.348.071.263,- Dengan pengalokasian anggaran ini diupayakan program pembangunan kota Batam bersinergi dengan GAB/GBS dan tata kelola pembangunan yang berporos gender. Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender kota Batam. Pada tahun 2023 tetap dilakukan pemanfaatan Sistem Aplikasi SIPUGA yang mengacu kepada system GAB/GBS yang diharapkan dapat menjadi basis data pelaksanaan gender di Kota Batam. Dan ketersediaan data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat.

Melalui program inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Perempuan, dan Indeks Pemberdayaan Gender di kota Batam yang berkorelasi dengan pencapaian IPM Kota Batam secara umumnya. Keberhasilan dalam pencapaian ini tentunya melibatkan semua sektor dan unsur-unsur lainnya yang prior dalam usaha pembangunan kota Batam baik dalam level pemerintahan maupun komponen swasta lainnya. Secara umum, dalam mewujudkan kualitas hidup dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam telah dilakukan berbagai langkah progresif yang memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam melangsungkan kehidupan berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial.

Menjelaskan kondisi ini sebagai berikut capaian IPG dan IDG Kota Batam Tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya :



Data Sumber : BPS Kota Batam



Data Sumber : BPS Kota Batam

Melalui grafik di atas dapat dijelaskan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94.75 yang meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 94.51. Pada tahun 2022 IPM Laki-laki sebesar 84.94 dan IPM Perempuan sebesar 80.28. Sedangkan pada tahun 2023 IPM Laki-laki 85.31 dan IPM perempuan sebesar 80.83. Ada peningkatan IPM perempuan sebesar 0.55 dari tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya akselerasi percepatan pembangunan perempuan yang mengikuti percepatan capaian pembangunan laki-laki.

Sebagai berikut komponen IPG Kota Batam Tahun 2022 dan 2023 :

KOTA BATAM	UHH		EYS		MYS		PENGELUARAN PERKAPITA		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2022	71.41	75.21	13.06	13.19	11.34	11.04	17.083	9.173	84.94	80.28	94.51
2023	71.63	75.49	13.21	13.34	11.36	11.17	27.027	17.748	85.31	80.83	94.75

Dari masing-masing komponen, perempuan masih lebih lambat peningkatannya di rata-rata lama sekolah sebesar 11.17 dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang hanya sebesar 17.7748 dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 27.027 Perempuan hanya unggul di umur harapan hidup sebesar 75.49 dibanding laki-laki sebesar 71.63 dan harapan lama sekolah unggul hanya sebesar 0.13 point di angka 13.34 dibanding laki-laki 13.21. Namun secara umum, IPG Kota Batam tercapai diatas IPG Nasional yang sebesar **91.63**.

IDG Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 58.65 capaian ini terlihat meningkat sebesar 0.27 point dari tahun sebelumnya IDG sebesar 58.38. Sebagai berikut komponen IDG Kota Batam tahun 2023 :

TAHUN	Keterlibatan dalam Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
2022	8.00	47.64	29.62
2023	8.00	43.36	29.63

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan IDG Kota Batam. Hal ini terlihat dari persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 29.63 dan keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen yang seharusnya mencapai kuota 30 % masih belum tercapai sesuai harapan karena masih berada di angka 8%. Demikian halnya perempuan sebagai tenaga profesional masih dibawah angka 50 % yaitu sebesar 43.36%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota Batam dalam membuka akses dan kesempatan maupun membuka wawasan kaum perempuan agar turut bersumbangsih terhadap perencanaan dan peningkatan pembangunan kota Batam. Dan diharapkan sinergitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas terkait lainnya seperti UMKM, Dinas Tenaga Kerja yang andil dalam melakukan berbagai pelatihan dan pembinaan terhadap perempuan dapat meningkatkan akselerasi dan kontribusi positif kaum perempuan dalam progress usaha pembangunan kota Batam melalui tenaga professional dalam sector pekerja.

Demikian halnya sumbangan pendapatan perempuan kota Batam pada tahun 2024 dapat terus ditingkatkan. Seterusnya diharapkan indikator ini sebagai sinyalmen yang positif dan berkelanjutan sehingga kaum perempuan tidak lagi menjadi kaum yang tebelakang tetapi turut andil dalam bagian yang besar dalam upaya pembangunan kota Batam secara umumnya. Melalui pencapaian ini perempuan harus lebih aktif lagi menggali kapasitas dan potensi diri dengan mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengimbangi akselerasi laki-laki di dalam lapangan pekerjaan. Dalam hal keterwakilan di parlemen perempuan pun masih menunjukkan capaian yang belum maksimal. Demikian halnya dengan sumbangan pendapatan perempuan masih terlihat adanya diskriminasi dimana sumbangan pendapatan perempuan masih di bawah angka rata-rata sumbangan pendapatan laki-laki.

Dengan pencapaian ini, secara umum melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak sasaran strategis yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan kualitas keluarga telah terlaksana dengan baik dengan IPG sebesar **94.75** dan IDG sebesar **58.65**.

Jika dibandingkan dengan target Nasional secara umum pencapaian indikator IPG kota Batam sebesar 94.75 masih diatas standard dan akselerasi pembangunan gender dapat menyesuaikan dengan target yang diharapkan. Namun pada capaian indeks Pemberdayaan Gender masih perlu usaha dan perbaikan yang signifikan karena masih mencapai 58.65. dibandingkan perolehan tingkat nasional sebesar 76.59. Dan untuk angka kelahiran total Kota Batam telah mereperesentasikan usaha dan perbaikan dalam upaya pengendalian jumlah penduduk dengan angka kelahiran total (TFR) sebesar 2.16 yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional sebesar 2.1. Sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga tercapai dengan baik pada angka 59.76 dengan target yang diharapkan sebesar 57.24. Berikut perbandingan capaian indikator dengan target Nasional Tahun 2023.

Tabel 1.1.3. Tabel Perbandingan Capaian dengan Standard Nasional

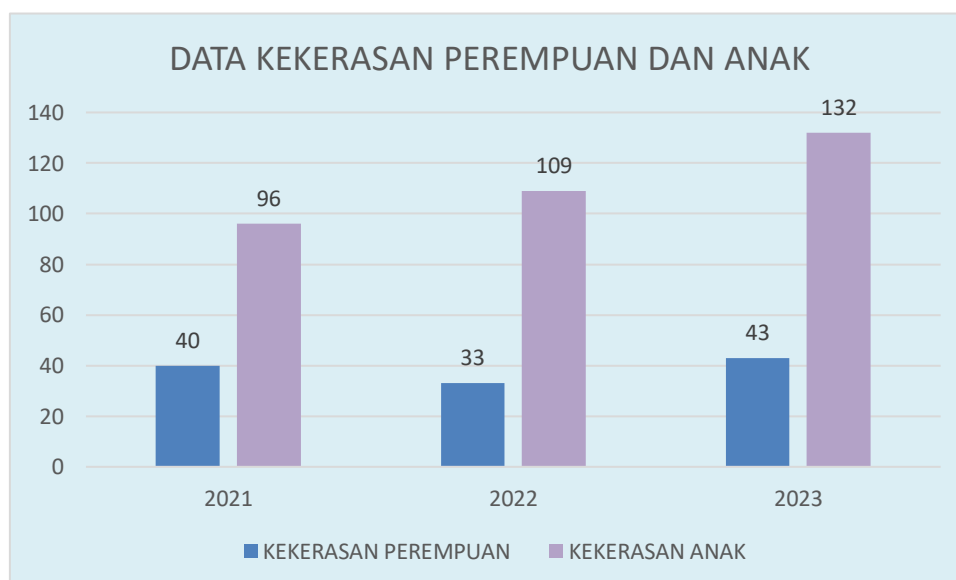
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			STAND ARD NASIONAL	Persentase Capaian
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.50	58.65	100.25%	76.59	SANGAT TINGGI
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	6%	Meningkat 23.2 %	Tidak Tercapai		
3	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.34	2,16	108.3%	2.1	TINGGI
4	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	57.26	59.76	104.3%	56.07	SANGAT TINGGI

Batam sebagai pusat industri dan wisata tampaknya menjadi daya tarik yang memikat setiap orang untuk mencoba hidup di kota Batam hal ini tentunya memicu tingginya mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Batam yang secara umum menciptakan masalah sosial yang kompleks dewasa ini. Banyaknya pencari pekerjaan perempuan yang datang yang tidak diimbangi dengan skill yang memadai maupun ketersediaan lapangan pekerjaan menciptakan tingginya angka pengangguran di kota Batam. Secara psikologis hal ini mengakibatkan tingkat stress kehidupan yang tinggi, karena banyaknya pasangan muda yang menikah, sulitnya memperoleh memperoleh sumber penghidupan akibat keterbatasan lapangan pekerjaan sementara harus membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Akibatnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.

Di sisi lain Batam sebagai border line dan tujuan transit ke luar negeri mengakibatkan seringnya terjadi tindak perdagangan orang ataupun trafiking, yang pada umumnya dialami oleh perempuan. Seringkali korban dijanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan gaji yang tinggi melalui akses keluar kota Batam. Namun ternyata hanyalah sebuah kedok yang berujung pada perdagangan orang dan dipekerjakan sebagai penjaja seks komersil. Fenomena ini bukan lah sesuatu yang langka di kota Batam.

Dalam hal inipun Dinas Pemberdayaan Perempuan telah berupaya semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan jejaring Tindak perdagangan orang maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kota Batam, diantaranya adalah :Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK, Gembala Baik dan stakeholder terkait lainnya baik vertical maupun horizontal.

Sebagai berikut gambaran Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kota Batam dalam kurun tiga tahun terakhir :



Melalui grafik di atas di gambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Batam dalam kurun 3 tahun terakhir angkanya meningkat dari tahun ke tahun, terjadi penurunan kasus pada tahun 2022 pada kekerasan perempuan namun kembali meningkat pada tahun 2023. Dari tahun 2022 dan 2023 antara jumlah kekerasan perempuan dan anak frekuensinya relative meningkat. Memang dibanding kekerasan terhadap perempuan, tingkat kekerasan terhadap anak angkanya masih lebih tinggi. Tetapi pada tahun 2023 angka ini terlihat meningkat signifikan pada kekerasan anak, demikian halnya kekerasan pada perempuan meningkat sebesar 30.3% .

Pada tahun 2023 ada kenaikan 13.5% angka kekerasan terhadap anak di bandingkan tahun 2022. Dan secara kumulatif kasus kekerasan perempuan dan Anak pada Tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 23.2 %. Data ini sesuai dengan yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Pada masa kini masalah pada anak adalah masalah yang cukup serius dan kompleks. Keterbukaan akses dan informasi teknologi melalui internet kerap memicu terjadinya aksi kekerasan dan perilaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur terutama dan cenderung pelaku kejahatan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah kandung, kerabat yang tinggal di rumah dan tetangga sekitar. Pada tahun 2023 dari 132 orang anak yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 43 orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan tentunya bagi kelangsungan generasi penerus bangsa Indonesia. Disamping itu dapat dijelaskan bahwa psikologis hidup keluarga yang rapuh dan tidak kuat dalam fondasi nilai moral dan sosial memicu kecenderungan perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2023 sebanyak 175 orang perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mencakupi 43 orang kekerasan terhadap perempuan per total perempuan 611.473 dan 132 orang kekerasan terhadap anak per total anak kota Batam saat ini sebesar .. Pada tahun ini terlihat angka kekerasan meningkat dibandingkan angka pada tahun lalu yang meliputi 175 orang terdiri dari 43 orang perempuan dan 132 orang anak dan angka ini yang tertinggi dari 3 tahun berturut turut antara 2021 sampai dengan 2023. Salah satu yang melatarbelakangi hal ini adalah rapuhnya nilai tatanan keluarga terkait kaidah norma dan sosial yang perlu mendapat edukasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak diharapkan dapat menjadi prioritas perbaikan selanjutnya. Selain itu hal ini juga di latar belakang oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat kota Batam yang dengan tuntutan hidup secara ekonomi dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di tahun 2023 ini yang sangat terbatas jumlahnya. Dan meningkatnya peluang/ kesempatan melakukan aksi pelecehan karena

keterbukaan informasi dan teknologi melalui handphone dan gadget menyebabkan kerentanan yang lebih tinggi bagi perempuan dan anak mengalami kekerasan baik kekerasan ekonomi maupun psikologis terutama seksual.

Pada umumnya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan. Menyikapi keadaan ini Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam gencar melakukan sosialisasi Perda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak di tingkat kecamatan maupun kelurahan Kota Batam. Maka dengan aktif mensosialisasikan perda tersebut diharapkan perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik. Disamping itu untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dilaksanakan pembentukan Satgas Anti kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dibentuk pada 2 pos yaitu Kelurahan Mangsang dan kelurahan Tanjung Riau. Satgas ini memberdayakan masyarakat agar aktif memantau dan mengawasi kondisi sekitar terkait perkembangan dan perlindungan anak di kota Batam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 s.d. tahun 2023 telah terbentuk 18 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak 12 Kecamatan sebanyak 44 Forum Anak tingkat kelurahan se kota Batam dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak di kota Batam yang pada tahun 2022 dilaksanakan di 2 kecamatan Belakang padang dan Bulang. Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan klinik laktase di tempat-tempat umum (Mall, bandara, perkantoran, dll). Demikian halnya keberadaan KPPAD Kota Batam yang turut mengambil bagian besar dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak secara umum di kota Batam.

Dengan demikian pada tahun 2023 telah dilakukan upaya yang sangat baik dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak baik dalam penanganan terhadap korban maupun pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak diterima total 175 orang melalui pengaduan dan kunjungan baik melalui Dinas P3A P2 & KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Adapun mekanisme pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2A & KB Kota Batam maupun P2TP2A Kota Batam tersebut melalui ;

1. Pengaduan / Identifikasi
2. Investigasi
3. Konseling dan Pendampingan korban; Psikologi dan Hukum

4. Penanganan di shelter (Rumah Singgah)
5. Reintegrasi Sosial

Kendatipun usaha yang dilakukan untuk meningkatkan layanan maupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah maksimal namun pada kondisi real di tahun 2023 target yang ingin dicapai belumlah tercapai dengan baik. Karena pada tahun 2023, target indikator Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak tidak terealisasi sesuai yang diharapkan pada angka penurunan kasus sebesar 6% yang berbanding terbalik dengan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara kumulatif sebesar 23.3%. Kondisi ini memerlukan upaya perbaikan dalam peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait resiko dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ketercapaian partisipasi aktif perempuan dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak ini, maka kualitas ketahanan keluarga di Kota Batam meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Jumlah Penduduk kota Batam dari tahun ke tahun umumnya mengalami peningkatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya daya tarik dalam lapangan pekerjaan di Kota Batam yang memberikan stimulus bagi kaum pencari kerja untuk masuk ke Kota Batam. Umumnya penduduk yang masuk ke kota Batam adalah usia produktif antara 18 s.d. 40 tahun. Pada tahun 2023 populasi kota Batam berjumlah 1.240.792 jiwa meningkat jumlahnya dari tahun 2022 sebanyak 1.196.396 jiwa. Terlihat kenaikan disebabkan oleh faktor kota Batam sebagai daerah tujuan pencari kerja. Masih tingginya minat pendatang masuk ke kota Batam untuk mencari lapangan kerja mendorong peningkatan jumlah penduduk kota Batam sepanjang tahun 2023. Penduduk kota Batam umumnya didominasi oleh usia produktif yang beresiko tinggi terhadap tingginya angka kelahiran di kota Batam.

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan program pelayanan KB gratis dengan sasaran Pasangan Usia Subur yang pada akhirnya diharapkan pada target pencapaian Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) dan TFR atau Angka kelahiran Total Penduduk.

CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Batam Tahun 2023 sebanyak 233.626 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam pada tahun 2023 sebanyak 191.992 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) x 100. Pada tahun 2023 capaian dari indikator ini sebesar **82.18 %** dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 81.0 walaupun ada sedikit *LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023*

penurunan dibanding pencapaian tahun 2022 sebesar **82.63 %**.

Pencapaian CPR (contraceptive prevalence rate) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Pada tahun 2023 tetap dilakukan upaya dan layanan KB secara maksimal baik di klinik layanan pemerintah maupun swasta yang tentunya pelayanan KB sehingga informasi mengenai program pembangunan kependudukan dan KB tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat kota Batam. Dan dalam mendukung program Keluarga Berencana telah didistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 105 Faskes dan klinik KB baik pemerintah maupun swasta yang memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan dan edukasi tentang KB.

Pencapaian CPR berkorelasi dengan indikator TFR (Total Angka Kelahiran) secara langsung. Kedua indikator ini berimplikasi satu sama lainnya dalam upaya mengurangi laju pertumbuhan penduduk Kota Batam. Indikator ini merupakan indikator turunan nasional yang ditujukan untuk dapat memantau keberhasilan program Bangga Kencana di lapangan. kedua indikator tersebut strategis dalam melihat tingkat fertilitas suatu wilayah, termasuk mencakup kesehatan reproduksi perempuan.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting dalam melahirkan tunas generasi yang unggul dalam hal ini di lakukan melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Bina Keluarga Remaja yang diselenggarakan di sekolah sekolah se-Kota Batam sebagai basis dan panduan informasi pembangunan keluarga sejahtera.

Demikian halnya penggerakan kampung KB dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan masyarakat tentang konsep dan tatanan nilai pelaksanaan program KB di kota Batam. Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB dan sebagai model perencanaan dan pengembangan program KKBPK yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 448 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Pada tahun 2023 juga dilaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) melalui Bakti Sosial Pelayanan KB gratis di 12 (dua belas) kecamatan dan pelayanan KB serentak dalam peringatan hari Kontrasepsi Nasional yang berkontribusi besar dalam pencapaian persentase pemakai kontrasepsi (CPR) sebesar 82.18

Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan program KB ini, maka ketercapaian Contraceptive Prevalence rate di kota Batam Tahun 2023 sebesar 82.18% dan TFR sebesar 2.16 dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023. Dengan kata lain capaian indikator ini terintegrasi dari keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam. Sebagai berikut Pencapaian Peserta KB aktif pada tahun 2023 :

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN SE KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	CAPAIAN IKP PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI							TOTAL
			IUD	MOW	MOP	IMPLANT	KONDOM	SUNTIK	PIL	
1	BELAKANG PADANG	5379	336	60	0	398	69	2127	684	3674
2	BATU AMPAR	10932	1927	55	0	367	702	3020	2903	8961
3	SEKUPANG	34840	2855	223	276	1999	1989	9745	6527	25158
4	NONGSA	10153	580	207	4	865	881	4981	1111	8886
5	BULANG	2241	44	67	0	157	289	983	262	1789
6	LUBUK BAJA	22778	607	12	0	593	1529	7703	4974	15949
7	SEI BEDUK	22019	523	31	11	482	2279	7742	4541	15621
8	GALANG	2803	32	77	0	252	47	1466	421	2375
9	BENGGONG	20430	704	287	0	588	1128	11527	3035	18020
10	BATAM KOTA	30841	2027	841	18	1986	2017	13224	6142	27418
11	SAGULUNG	43900	978	272	2	1651	2613	17092	13536	39777
12	BATU AJI	27310	1709	156	10	2000	996	13235	5735	24364
JUMLAH PUS		233626	12322	2288	321	11338	14383	92845	49871	191992

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting, melalui program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat resiko stunting pada kelahiran anak di Kota Batam. Melalui tim pendamping keluarga yang dibentuk sebanyak 544 tim di tingkat kecamatan dan kelurahan pada tahun 2023 diberikan edukasi dini kepada calon pengantin, ibu hamil maupun ibu menyusui tentang resiko stunting pada calon bayi dan anak balita sedini mungkin. Program pembangunan keluarga selain menysasar kepada perbaikan dan pencegahan stunting juga dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga melalui pembinaan kepada masyarakat yang dibentuk melalui kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R dan UPPKS) Program ini mengupayakan adanya pemahaman masyarakat terkait pembinaan keluarga dan upaya peningkatan taraf hidup keluarga melalui bekal keterampilan usaha keluarga dan wawasan dalam membentuk keluarga sejahtera mandiri yang pada akhirnya nanti menysasar kepada peningkatan kualitas ketahanan keluarga (indeks pembangunan keluarga) Pada tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 430 kelompok ketahanan keluarga yang diharapkan dapat berkontribusi aktif meningkatkan edukasi pembangunan keluarga yang bertujuan mencapai sasaran indeks pembangunan Kota Batam dengan target sebesar 57.24 dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 59.76 dengan komponen pendukung sebagai berikut :

Indeks Ketentraman	Indeks kemandirian	Indeks Kebahagiaan	i Bangga Kota Batam
59.92	54.09	65.29	59.76

Demikian halnya penyediaan sarana dan prasarana layanan KB yang terlaksana 100 % di tahun 2023 melalui pengadaan Implant Removal KIT sebanyak 37.242 unit dan IUD Kit sebanyak 39 unit yang diserahkan kepada masyarakat melalui faskes dan fasilitas layanan KB upaya menysukseskan program Pembinaan Keluarga Berencana di Kota Batam

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan laporan akuntabilitas keuangan pelaksanaan program tahun 2023 juga telah terlaksana dengan baik dengan serapan anggaran sebesar **Rp 26.332.319.155,- (89.35%)** dari total anggaran sebesar **Rp. 29,470,474,206** Sejumlah kendala yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan KB Metode Kontrasepsi modern yakni MOP dan MOW pada pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga Berencana yakni jumlah sasaran KB Modern Pria dan Wanita tidak tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan DAK BOKB tahun 2023 terlaksana dengan baik dengan persentasi fisik 95 % dalam upaya meningkatkan pelayanan KB dan pembangunan keluarga sejahtera. Program ini memuat pembinaan kader KB, layanan KB, maupun sosialisasi penyuluhan program KKBPK dan stunting kepada masyarakat kota Batam sepanjang tahun 2023 dan memberikan edukasi dini kepada masyarakat terkait pencegahan gangguan pertumbuhan pada anak (Stunting) sebagai generasi emas penerus pembangunan kota Batam. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran aktif tenaga lini lapangan KB (PPKBD/SUB PPKBD) tingkat kecamatan dan kelurahan dalam membina dan mengembangkan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR, PIK-R, UPPKS) dan Tim pendamping keluarga yang dibentuk sebanyak 544 Tim (1632 orang) pada tahun 2023 se- kota Batam. Melalui peningkatan pelayanan KB dan edukasi tentang program pembangunan keluarga baik di klinik pemerintah dan swasta maupun faskes se-kota Batam telah diterapkan dengan baik sehingga pencapaian indikator CPR sebesar 86.40 tercapai diatas target tahun 2023 pada angka 81.0, TFR sebesar 2.16 dari target yang ditetapkan sebesar 2.34 dan capaian indeks pembangunan Keluarga sebesar 59.76.

Tabel 3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis/IKU	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	58.50	58.65	100.25%	8.334.152.440	8.124.110.500	97.47%
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	6%	Meningkat 23.2 %	Tidak Tercapai	1.336.777.000	1.216.573.450	91%
3	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	2,34	2,16	108.3%	5.567.123.000	3.614.887.507	64.93%
4	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	57.26	57.29	104.3%	4.293.800.000	3.900.671.500	92%

Tabel 3.2.1. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Kode	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Realisasi s/d 31 Desember	Realisasi Keuangan (%) Bulan Desember	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9,992,621,766	9,476,076,198	94.83%	516,545,568
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,456,928,446	8,211,784,978	97.10%	245,143,468
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,408,038,446	8,166,974,978	97.13%	241,063,468
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,890,000	44,810,000	91.65%	4,080,000
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	603,300,400	473,678,850	78.51%	129,621,550
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,213,250	10,679,000	95.24%	534,250
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,294,150	37,191,300	92.30%	3,102,850
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,538,000	15,588,000	88.88%	1,950,000
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,459,000	8,040,000	76.87%	2,419,000
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,944,000	11,935,300	74.86%	4,008,700
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507,852,000	390,245,250	76.84%	117,606,750
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	59,024,000	39,450,000	66.84%	19,574,000
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,024,000	39,450,000	66.84%	19,574,000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700,468,920	596,704,370	85.19%	103,764,550
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,757,800	60,206,526	53.87%	51,551,274
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588,711,120	536,497,844	91.13%	52,213,276
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172,900,000	154,458,000	89.33%	18,442,000

2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,060,000	71,769,500	90.78%	7,290,500
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,550,000	71,818,500	87.00%	10,731,500
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,290,000	10,870,000	96.28%	420,000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5,942,125,440	5,777,685,000	97.23%	164,440,440
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,942,125,440	5,777,685,000	97.23%	164,440,440
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5,942,125,440	5,777,685,000	97.23%	164,440,440
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2,324,785,000	2,280,552,500	98.10%	44,232,500
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	29,465,000	26,962,500	91.51%	2,502,500
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	29,465,000	26,962,500	91.51%	2,502,500
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,295,320,000	2,253,590,000	98.18%	41,730,000
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2,295,320,000	2,253,590,000	98.18%	41,730,000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	67,242,000	65,873,000	97.96%	1,369,000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67,242,000	65,873,000	97.96%	1,369,000

2.08.05.2. 01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	67,242,000	65,873,000	97.96%	1,369,000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	576,364,000	498,713,000	86.53%	77,651,000
2.08.03.2. 01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	475,340,000	431,630,000	90.80%	43,710,000
2.08.03.2. 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	475,340,000	431,630,000	90.80%	43,710,000
2.08.03.2. 02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101,024,000	67,083,000	66.40%	33,941,000
2.08.03.2. 02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101,024,000	67,083,000	66.40%	33,941,000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	110,960,000	83,733,000	75.46%	27,227,000
2.08.07.2. 02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	110,960,000	83,733,000	75.46%	27,227,000
2.08.07.2. 02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	110,960,000	83,733,000	75.46%	27,227,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	649,453,000	634,127,450	97.64%	15,325,550
2.08.06.2. 01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	649,453,000	634,127,450	97.64%	15,325,550
2.08.06.2. 01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	649,453,000	634,127,450	97.64%	15,325,550

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,241,923,000	3,300,054,439	62.96%	1,941,868,561
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	844,600,000	777,991,639	92.11%	66,608,361
2.14.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK Kepada stakeholders dan mitra kerja	80,000,000.00	79,048,000	98.81%	952,000
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	60,000,000.00	55,010,000	91.68%	4,990,000
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK Melalui media KIE	150,000,000.00	145,671,500	97.11%	4,328,500
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), mini lokakarya (Minlok)	156,000,000.00	151,045,000	96.82%	4,955,000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	318,600,000.00	268,097,139	84.15%	50,502,861
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	79,120,000	98.90%	880,000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Punyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	240,000,000	240,000,000	100.00%	-
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	112,000,000	112,000,000	100.00%	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	128,000,000	128,000,000	100.00%	-
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3,946,823,000	2,093,022,800	53.03%	1,853,800,200
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	140,400,000	130,200,000	92.74%	10,200,000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2,779,703,000	1,219,540,800	43.87%	

2.14.03.2. 03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	957,420,000	678,162,000	70.83%	
2.14.03.2. 03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	69,300,000	65,120,000	93.97%	4,180,000
2.14.03.2. 04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	210,500,000	189,040,000	89.81%	21,460,000
2.14.03.2. 04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	210,500,000	189,040,000	89.81%	21,460,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4,239,800,000	3,900,671,500	92.00%	339,128,500
2.14.04.2. 01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4,239,800,000	3,900,671,500	92.00%	339,128,500
2.14.04.2. 01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	360,000,000	235,000,000	65.28%	125,000,000
2.14.04.2. 01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	452,600,000	429,471,500	94.89%	23,128,500
2.14.04.2. 01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3,427,200,000	3,236,200,000	94.43%	191,000,000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	325,200,000	314,833,068	96.81%	10,366,932
2.14.02.2. 01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam	59,400,000	56,193,200	94.60%	3,206,800

	Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	59,400,000	56,193,200	94.60%	3,206,800
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	265,800,000	258,639,868	97.31%	7,160,132
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	64,200,000	60,505,300	94.25%	3,694,700
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	129,600,000	129,400,000	99.85%	200,000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72,000,000	68,734,568	95.46%	3,265,432
TOTAL		29,470,474,206	26,332,319,155	89.35%	3,138,155,051

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana dengan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara fisik maupun dari sisi keuangannya. Sehingga secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal dan memenuhi Rencana Capaian Kinerja (target) sesuai yang tertuang dalam 4(empat) rencana strategis yang ingin dicapai.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban terhadap Penetapan Kinerja”

Dari seluruh Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis dalam program-program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil merealisasikannya dan diharapkan capaian ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang sehingga tetap proaktif merespons segala tantangan yang ada dalam upaya Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri sebagai tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2021-2026.

Sebagai akhir dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini, indikator ukuran dan pembuatannya dilaksanakan dengan tetap mengacu dan berpedoman pada aturan baku pembuatan LKjIP yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Batam.

